

Pengaruh Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat

The impact of audit opinions on the financial statements of local governments on the welfare of the community in West Kalimantan Province

Dina Rizky Ramadhani¹

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Indonesia

Roni Yanto²

² Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

ABSTRACT

ABSTRAK

Peningkatan perolehan opini WTP pada pemerintah daerah menimbulkan tanda tanya mengenai keterkaitannya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada kesejahteraan masyarakat yang diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat. Variabel IPM digunakan sebagai variabel dependen dan opini LKPD, skor opini, dan nilai temuan digunakan sebagai variabel independen. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, peneliti menggunakan seluruh populasi, yaitu 14 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2011 hingga 2022. Data yang digunakan bersumber dari situs *web* BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPK sehingga merupakan data sekunder. Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu opini audit, skor opini, dan nilai temuan secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara itu, secara individual, masing-masing variabel opini LKPD dan skor opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun, variabel nilai temuan belum menunjukkan pengaruhnya yang signifikan secara individu pada IPM di pemerintah kabupaten dan kota lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: IPM, nilai temuan, opini LKPD, skor opini.

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 14 Desember 2024
Direvisi 30 Desember 2024
Disetujui 31 Desember 2024
Terpublikasi 09 Januari 2025

***Korespondensi:**

Nama: Roni Yanto

E-mail:

roniyanto@ibrahimyy.ac.id

***E-ISSN : 2622-6898**

The increase in the acquisition of unqualified opinions (WTP) by local governments raises questions regarding its correlation with the enhancement of local community welfare. This study was conducted to examine the impact of audit opinions on the Local Government Financial Reports (LKPD) concerning community welfare, represented by the Human Development Index (HDI) indicators in West Kalimantan Province. The HDI variable serves as the dependent variable, while the LKPD opinion, opinion scores,

and findings are utilized as independent variables. To enhance the validity of the research results, the study encompasses the entire population, which includes 14 regencies and cities in West Kalimantan Province from 2011 to 2022. The data utilized is sourced from the West Kalimantan Province BPS website and the BPK, thus constituting secondary data. The conclusions drawn from the research indicate that audit opinions, opinion scores, and findings collectively exert a significant influence on the HDI. Furthermore, individually, both the LKPD opinion and opinion scores have a positive and significant impact on the HDI. However, the findings variable has not yet demonstrated a significant individual effect on the HDI within the regencies and cities of West Kalimantan Province.

Keywords: *Human Development Index, findings value, opinions of the Local Government Financial Report, opinion score.*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan (Arens, et al., 2014). Dalam prosesnya, keuangan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, pemerintah menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan daerah tersebut melalui penyusunan LKPD. Laporan tersebut terdiri dari tujuh laporan yang disusun secara periodik setiap tahunnya. Setelah itu, laporan keuangan akan direviu oleh instansi pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2014).

Pemeriksaan oleh BPK bertujuan untuk menilai kepatuhan laporan keuangan yang disajikan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Hasil pemeriksaan ini berupa opini yang merupakan penilaian profesional auditor mengenai tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan. Dalam memberikan opini tersebut, penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Laporan yang disusun harus patuh dan sesuai pada standar akuntansi pemerintahan, serta seluruh informasi keuangan telah diungkapkan secara memadai. Selain itu, tata kelola keuangan juga harus patuh dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria lain yang dinilai ialah terkait dengan efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian berbentuk opini yang diberikan oleh auditor meliputi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2014); (Firmansyah & Nuryani, 2020).

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umumnya menjadi ukuran dalam menilai kemampuan pengelolaan keuangan masing-masing entitas (Firmansyah & Nuryani, 2020). Kewajaran dalam menyajikan laporan keuangan yang dicerminkan oleh opini BPK atas laporan keuangan menjadi penting dalam hal menjamin keyakinan pengguna laporan keuangan bahwa informasi keuangan yang disajikan telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku serta telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada informasi yang reliabel (Zamzami, et al., 2014).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP dari BPK dianggap mampu mengelola keuangan daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik tersebut diasumsikan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengelola kekayaan daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kesejahteraan masyarakat merujuk pada suatu

keadaan di mana seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi yang memungkinkan mereka untuk hidup secara layak. Masyarakat yang sejahtera memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat tersebut sering dinyatakan melalui indikator, salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri menilai pencapaian pembangunan manusia berdasarkan dimensi dasar kualitas hidup yang melingkupi tiga hal, yaitu kesehatan dan umur yang panjang, diperolehnya pengetahuan, serta terpenuhinya standar hidup yang layak (Indramawan, 2021); (Istiyanto, 2016); (Muhtar & Amarulah, 2018); (Anitasari, et al., 2024).

Hasil penelitian Adinata, et al (2023) menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh variabel IPM secara signifikan dipengaruhi oleh akumulasi dari skor opini audit serta persentase temuan audit. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya peningkatan pada perolehan opini audit dan diperolehnya opini WTP secara berturut-turut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian serupa oleh Akib, et al (2016) dengan subjek pemerintah Sulawesi Tenggara juga menunjukkan pengaruh yang signifikan antara opini audit dan kesejahteraan dengan IPM sebagai alat ukur. Sebaliknya, penelitian Ditasari dan Sudrajat (2020) menunjukkan hasil yakni opini audit tidak memberikan pengaruh pada kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur. Sementara itu, Akbar & Djazuli (2015) menemukan bahwa tidak ada dampak signifikan yang diberikan oleh opini terhadap kesejahteraan masyarakat dalam penelitian yang dilakukan pada kabupaten dan kota di Bali pada tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui lebih dalam terkait pengaruh opini audit atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat maka dalam penelitian ini akan mengkaji hubungan antara kedua variabel tersebut menggunakan metode statistik dan ekonometrika. Penelitian ini akan menggunakan indikator IPM untuk menggambarkan variabel kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, variabel opini audit yang digunakan antara lain opini audit, akumulasi skor opini audit, dan nilai temuan.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada semua pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2022 hingga 2022 yang berjumlah sebanyak 14 entitas pemerintah daerah. Agar hasil penelitian lebih valid, keseluruhan populasi tersebut diambil sebagai sampel. Sedangkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dimasukkan sebagai data dalam penelitian karena data tersebut mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Model Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kausalitas berbasis kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis terkait pengaruh opini audit atas LKPD pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari web BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPK. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah sehingga membentuk panel data yang merupakan perpaduan antara data runtu waktu dari tahun 2011 hingga 2022 dan data silang dari 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan aplikasi EViews 10 untuk mempermudah analisis dan uji hipotesis. Variabel dependen (y) yang digunakan adalah IPM. Sementara itu, variabel independen (x) antara lain opini audit, skor opini audit, dan nilai temuan.

Suatu model ekonometrika yang menggunakan kombinasi data runtu waktu dan data silang dalam modelnya dan kemudian dilakukan estimasi atas model yang melibatkan kedua data tersebut maka model tersebut merupakan model data panel

(Wahyudi, 2020); (Firdaus, 2019). Model panel data memiliki bentuk umum sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \dots + \alpha_{it} + e \quad (1)$$

Keterangan:

- Y_{it} = Variabel dependen data silang ke-i dan pada runut waktu ke-t
- X_{it} = Variabel independen data silang ke-i dan pada runut waktu ke-t
- β = Konstanta
- α_{it} = Cross section random (unobserved factor)
- e = Error

Berdasarkan bentuk umum tersebut, persamaan model dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \alpha_{it} + e \quad (2)$$

Keterangan:

- Y_{it} = IPM pada pemda ke-i dan tahun ke-t
- X_{1it} = Opini audit pemda ke-i dan tahun ke-t
- X_{2it} = Skor opini pemda ke-i dan tahun ke-t
- X_{3it} = Nilai temuan pemda ke-i dan tahun ke-t
- B = Konstanta
- α_{it} = Cross section random (unobserved factor)
- e = Error

Model-model yang dihasilkan dalam panel data mencakup common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM). Dalam menentukan model terbaik di antara ketiganya, perlu dilakukan serangkaian uji model. Dalam menentukan antara model CEM dan FEM yang paling sesuai untuk digunakan, dilakukan prosedur uji Chow dengan rumusan sebagai berikut.

H₀ = CEM

H₁ = FEM

Selanjutnya, pemilihan antara model FEM dan REM yang paling sesuai untuk digunakan, dilakukan prosedur uji Hausman dengan rumusan sebagai berikut.

H₀ = REM

H₁ = FEM.

Definisi Variabel

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dipilih sebagai variabel dependen (y) yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Data IPM untuk kabupaten/kota di wilayah tersebut dari tahun 2011 hingga 2022 diperoleh melalui situs web BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Opini LKPD (OPINI)

Opini LKPD sebagai variabel independen (x) dalam penelitian ini merupakan dummy status opini LKPD, yaitu WTP=1 dan selain WTP=0. Data OPINI diperoleh dari data BPK.

Skor Opini (SKOROPINI)

Skor Opini sebagai variabel independen merupakan dummy dari akumulasi nilai opini LKPD dari satu tahun ke tahun berikutnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

Skor opini tahun t = Dummy status opini LKPD tahun t + dummy status opini LKPD tahun (t-1)

Nilai Temuan (TEMUAN_T)

Variabel nilai temuan sebagai variabel independen merupakan jumlah nilai temuan yang dilaporkan pada LHP BPK atas LKPD tahun t-1. Hal tersebut dilakukan dengan

asumsi bahwa terdapat lag di mana temuan pada tahun t-1 akan dilaporkan pada tahun t dan penyelesaian atas temuan tersebut juga akan dilakukan pada tahun t.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1: Opini LKPD suatu daerah pada satu periode berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hipotesis 2: Opini WTP yang diperoleh suatu daerah secara berturut-turut berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hipotesis 3: Nilai temuan pada LKPD berpengaruh negatif dan signifikan pada IPM.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen, serta keterkaitan antara variabel-variabel independen dalam suatu penelitian dapat dilihat melalui uji korelasi. Hasil pengujian tersebut dapat ditemukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hubungan Variabel Dependen dan Independen

	IPM	Opini	Skoropini	Temuan_T
IPM	1,000000			
OPINI	0,431195	1,000000		
SKOROPINI	0,516199	0,723359	1,000000	
TEMUAN_T	-0,025758	-0,117560	-0,115172	1,000000

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil uji korelasi, dapat dilihat bahwa hubungan paling kuat dengan IPM terdapat pada variabel skor opini dibanding variabel independen lain. Hubungan antara variabel opini dan IPM serta variabel skor opini dan IPM bernilai positif yang menunjukkan bahwa semakin baik opini audit pada suatu daerah dan semakin banyak opini WTP yang diperoleh oleh suatu daerah maka IPM akan semakin baik. Sementara itu, hubungan antara nilai temuan dan IPM bernilai negatif yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai temuan pada suatu daerah pada tahun tertentu maka nilai IPM akan semakin kecil.

Selain untuk mengetahui hubungan antarvariabel dalam model, uji korelasi antarvariabel bebas juga digunakan untuk menentukan adanya multikolinearitas pada model. Multikolinearitas pada suatu model dapat dideteksi jika korelasi antarvariabel bebas menunjukkan keterkaitan di atas angka 0,8. Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai keterkaitan antara variabel-variabel bebas di bawah angka 0,8, sehingga dapat dikatakan pada model tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

Prosedur penentuan model terbaik dilakukan untuk memperoleh model yang paling sesuai dari tiga model data panel. Dalam proses pemilihan antara model CEM dan FEM, dilakukan uji *Chow* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistics	d.f.	Prob.
Cross-section F	162.920873	(13,151)	0.0000
Cross-section Chi-square	455.246740	13	0.0000

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Probabilitas *chi-square* hasil pengujian seperti tampak pada tabel di atas sebesar 0,0000 atau kurang dari *alpha* sebesar 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan model terpilih adalah FEM.

Selanjutnya, uji *Hausman* dilaksanakan untuk menentukan antara model REM atau FEM sebagai model yang paling baik. Hasil uji *Hausman* dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.330287	3	0.5067

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan uji *Hausman*, nilai probabilitas sebesar 0,5067, lebih dari 0,05. Oleh karena itu, H₀ diterima dan model yang terpilih ialah REM. Langkah berikutnya melibatkan pengujian asumsi klasik guna memastikan bahwa tidak ada gangguan yang memengaruhi hasil estimasi, sehingga hasil pengujian yang dilakukan dapat dianggap valid untuk proses interpretasi. Namun demikian, banyak literatur yang menyebutkan bahwa uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan seluruhnya dengan beberapa alasan. Satu di antara alasan tersebut ialah apabila metode regresi data panel yang digunakan merupakan *Generalized Least Squares* (GLS) atau REM.

Apabila model data panel dengan metode GLS yang terpilih, uji asumsi klasik yang dilakukan hanya multikolinearitas, karena metode GLS dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi (Gujarati, 2013). Hasil pengujian REM dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi menggunakan REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.25492	1.041843	60.71442	0.0000
OPINI	1.396513	0.242169	5.766698	0.0000
SKOROPINI	0.497675	0.037190	13.38186	0.0000
TEMUAN_T	1.61E-11	1.56E-11	1.033707	0.3028
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.856618	0.9350
Idiosyncratic random			1.017215	0.0650
Weighted Statistics				
R-squared	0.740548	Mean dependent var	4.981421	
Adjusted R-squared	0.735802	S.D. dependent var	1.974964	
S.E. of regression	1.015136	Sum squared resid	169.0022	
F-statistic	156.0337	Durbin-Watson stat	0.400872	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.274903	Mean dependent var	65.61345	
Sum squared resid	2369.589	Durbin-Watson stat	0.028591	

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Pembahasan

Uji regresi berganda meliputi beberapa metode pengujian, termasuk uji *R-squared*, uji signifikansi-F, dan uji signifikansi *t-statistics*. Uji signifikansi-F bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji signifikansi-t digunakan untuk menilai dampak parsial atau individu dari tiap-tiap variabel independen pada variabel dependen. Sementara itu, uji *R-squared* bertujuan untuk mengukur seberapa baik variabel-variabel penelitian dapat menjelaskan model secara keseluruhan. Dari hasil uji regresi menggunakan model REM, didapati bahwa

probabilitas *F- statistics* sebesar 0,000000, yang kurang dari nilai *alpha* 0,05. Dari hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa secara bersama-sama, variabel opini LKPD, skor opini, dan nilai temuan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Selain itu, uji koefisien determinasi R^2 menghasilkan angka sebesar 0,740548 atau 74,05%, menunjukkan bahwa variabel opini LKPD, skor opini, dan nilai temuan dapat menjelaskan sekitar 74,05% variasi dalam model. Sisanya, sekitar 25,95%, dapat diatribusikan kepada variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Opini LKPD suatu daerah pada satu periode berpengaruh terhadap IPM

Dilihat secara individual atau parsial berdasarkan hasil uji signifikansi-*t*, opini LKPD memiliki probabilitas 0,000000 atau kurang dari 0,05, dengan nilai statistik sebesar 5,766693. Nilai koefisien sebesar 1,396513, artinya setiap 1 kenaikan pada opini akan meningkatkan IPM sebesar 1,396513. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa opini LKPD memiliki pengaruh signifikan dan positif pada IPM di Kalimantan Barat. Dengan demikian, hipotesis 1 dapat diterima, yaitu opini audit yang diperoleh suatu pemerintah daerah pada suatu periode memiliki pengaruh signifikan dan positif pada IPM. Hasil ini didukung penelitian Akib, *et al* (2016).

Opini WTP yang diperoleh suatu daerah secara berturut-turut berpengaruh terhadap IPM

Selanjutnya, variabel skor opini juga memiliki probabilitas *t-statistics* sebesar 0,000000, dan memiliki nilai statistik 13,38186. Artinya, skor opini memiliki pengaruh signifikan, dan berpengaruh positif pada peningkatan IPM. Secara spesifik, setiap peningkatan 1 pada skor opini akan berdampak pada peningkatan IPM sebesar 0,497675. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh simpulan yakni pemerintah daerah yang secara berturut-turut memperoleh opini WTP dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan IPM di wilayahnya. Oleh karena itu, hipotesis 2 dapat diterima, menandakan bahwa opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah secara berturut-turut memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan IPM. Hasil ini didukung penelitian Adinata, *et al* (2023).

Opini WTP yang diterima pemerintah daerah atas LKPD menunjukkan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menyajikan LKPD dengan menaati standar akuntansi pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah daerah tersebut telah mengungkapkan informasi keuangan secara memadai dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Predikat WTP yang diperoleh juga mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah telah memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan diperolehnya opini WTP atas laporan keuangan menunjukkan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan bersih tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tergambar melalui peningkatan IPM di daerah bersangkutan.

Nilai temuan pada LKPD berpengaruh pada IPM

Variabel nilai temuan dalam penelitian ini menunjukkan hasil probabilitas *t-statistics* sebesar 0,3028 dengan nilai koefisien $1,61E^{-11}$. Nilai probabilitas *t-statistics* yang lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 menandakan bahwa nilai temuan belum memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan IPM secara individual. Hal tersebut membuat hipotesis 3 ditolak, yaitu penelitian ini menunjukkan dengan menurunnya nilai temuan belum memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan IPM di Kalimantan Barat.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa opini audit, skor opini, dan nilai temuan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2011 hingga 2022. Kesimpulan dari analisis regresi data panel menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 penelitian ini dapat diterima, yaitu opini audit memberikan pengaruh positif dan signifikan pada IPM dan diperolehnya opini WTP secara berturut-turut oleh pemerintah daerah memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan IPM. Meskipun demikian, hipotesis 3 belum terbukti pada penelitian ini, yang menyiratkan bahwa penurunan nilai temuan tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil uji R-squared dihasilkan angka sebesar 0,740548 atau 74,05%, menandakan bahwa variabel opini LKPD, skor opini, dan nilai temuan dapat menjelaskan sebagian besar model. Sementara sisanya dapat diatribusikan pada variabel-variabel selain yang ada pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adinata, W., Puspendoyo, T., & Ling, M. (2023). Pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(3), 219-234. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.566>.
- Akbar, B., & Djazuli, A. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi pada Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara* Hal 1 - 19. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.9>.
- Akib, M., et al. (2016). Relationship of Good Governance with Welfare Society Mediated by Local Government Financial Disclosure and Audit Report Opinion (Study on Local Government Southeast Sulawesi). *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Volume 5, Issue 2, February: 789-800. https://www.ijsr.net/get_count.php?paper_id=NOV161150.
- Anitasari, H., Aziz, K. F., & Putri, Y. A. (2024). Kontribusi Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Satu Keresidenan Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 7(1), 184-191. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1254>
- Arens, A. A., Ellder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. 15th ed. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2014). *Sistem Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Basis Akrual*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ditasari, R.A., & Sudrajat, M.A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi* Volume 4 No. 2 Oktober 2020. <http://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>.
- Firdaus, M. (2019). *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Firmansyah, A., & Nuryani. (2020). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Adab.
- Indramawan, D., Handayanto, A. B., & Djajanti, A. (2021). Pentingnya Opini Audit sebagai Pemeditasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset & Aplikasi: Akuntansi & Manajemen*, 5(2), September 2021, 209-218. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.007>.

- Istiyanto, S. (2016). Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 16, No.2, Agustus 2016: 135-147.* <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v16i2.202>.
- Muhtar, M., & Amarulah, R. (2018). Sebuah Paradoks: Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Borneo Administrator, 14(2), 135-150.* Diakses dari <https://doi.org/10.24258/jba.v14i2.335>.
- Wahyudi, S.T. (2020). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika menggunakan Eviews Edisi Kedua.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Zamzami, F., Mukhlis, Pramesti, A.E. (2014). *Audit Keuangan Sektor Publik untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.